



RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan bagi Pemerintah Daerah dimana Badan Pendapatan Daerah merupakan termasuk dalam unsur eksekutif dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerjanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 memuat sasaran kinerja yang ingin dicapai untuk pemenuhan target yang ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini juga berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 11 Juli 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



MARDIASIH, SH.MH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196404051997032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN LALU.	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	30
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.MOJOKERTO	46
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah	47
3.3 Program Dan Kegiatan	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2020	57
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2019	16
2.	Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	31
3.	Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	40
4.	Tabel 2.4	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	45
5.	Tabel 4.1	Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan nafas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menuju Kabupaten Mojokerto lebih sejahtera, maju dan berdaya saing. Dengan kata lain, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk mencukupi urusan rumah tangganya dan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan anggaran/keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan. Konsekuensi bagi setiap daerah harus memacu diri untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah guna menopang anggaran belanja daerah. Untuk itu perlu diupayakan usaha yang maksimal dan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Penyusunan Renja Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara kebijakan, program, dan kegiatan, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja dengan Renstra. Berpedoman pada RKPD, bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah selaras dengan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Adapun proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan RENJA, penyusunan rancangan awal RENJA, penyusunan rancangan RENJA, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir RENJA dan penetapan RENJA.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus terhadap kondisi eksisting Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, evaluasi pelaksanaan RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan, yang memuat misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Mojokerto dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan kedudukan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dipandang perlu menyusun suatu RENJA Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) pada setiap tahun anggaran. Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntabel berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (RENSTRA - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto) yang diformulasikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah (lima tahun) dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto serta berdasarkan dokumen usulan program dan kegiatan tahunan (rasionalisasi program, kegiatan dan anggaran) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan (tahunan) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja (RENJA) merupakan instrumen kebijakan

Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan kata lain, RENJA merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui OPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto selama 1 (Satu) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini untuk menetapkan dokumen perencanaan dan memberikan arah serta pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA adalah :

1. Memberi pedoman dalam melaksanakan pengendalian, mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah daerah;
5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
6. Menganalisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Menganalisis Hasil Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Lalu;

8. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto; dan
9. Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, Proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat penjelasan umum dari program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.MOJOKERTO

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022.

BAB V.

PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh PD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. RENSTRA tersebut juga merupakan panduan Bapenda selaku PD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Capaian kinerja Pendapatan Daerah tahun 2021 pada umumnya tercapai sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan 2021 dan realisasinya. Adapun capaian kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.990.000,00 (99,80 %)
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini dianggarkan Rp. 5.00.000,00 telah terealisasi Rp. 4.988.000,00 (99,76%)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.19.811.843.100,00 telah terealisasi sebesar Rp. 18.612.116.492,00 (93,94%)
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 29.194.000,00 (97,31 %)
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. - telah terealisasi sebesar Rp. - (0 %)
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.151.747.029,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.043.982.800,00 (90,64 %)
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 68.207.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 68.196.000,00 (99,98 %)
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 258.088.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 254.714.300 (98,69 %)
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 142.174.356,00 telah terealisasi sebesar Rp. 125.750.000,00 (88,45 %)
 - e. Penyediaan Bahan / Material. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 267.933.814,00 telah terealisasi sebesar Rp. 258.904.415,00 (96,63 %)
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.994.775,00 telah terealisasi sebesar Rp. 34.994.775,00 (100,00 %)
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 45.952.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 15.395.000,00 (33,50 %)

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 198.636.760,00 telah terealisasi sebesar Rp.158.256.200,00 (79,67 %)
 - b. Pengadaan Mebel Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. - telah terealisasi sebesar Rp. - (0 %)
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 35.250.000 (97,92 %)
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 262.024.219,00 telah terealisasi sebesar Rp. 183.011.231,00 (69,85 %)
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 224.400.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 216.122.184,00 (96,31 %)
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 814.131.975,00 telah terealisasi sebesar Rp. 444.342.314,00 (54,58%)
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. SubKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 48.895.650,00 (97,759%)
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.495.460,00 telah terealisasi sebesar Rp. 156.825.000,00 (62,61 %)
8. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Penagihan Pajak Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.058.115.150,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.913.097.700,00 (95,26 %)
- b. Perencanaan pengelolaan pajak daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.569.175,00 telah terealisasi sebesar Rp. 18.924.750,00 (46,65 %)
- c. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 227.987.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 181.849.810,00 (79,76 %)
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 539.019.880,00 telah terealisasi sebesar Rp. 507.949.698,00 (94,24 %)
- e. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.560.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 50.152.500,00 (71,08 %)
- f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 225.214.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 133.002.900,00 (59,06 %)
- g. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 251.231.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 184.763.930,00 (73,54 %)
- h. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.396.215.500 telah terealisasi sebesar Rp. 1.304.004.850,00 (93,40 %)
- i. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 203.950.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 184.605.900,00 (90,52 %)
- j. Penetapan Wajib Pajak Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 158.869.800,00 telah terealisasi sebesar Rp. 156.555.900,00 (98,54 %)

- k. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 108.081.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 105.208.350,00 (97,34 %)

2. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 (n-2) adalah sebagai berikut :

- a) Dari 7 Program dan 25 Kegiatan terdapat capaian realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan terdiri dari :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

3) Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah

- Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah

- b) Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan rata-rata telah mencapai angka 90 % meliputi:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Alat tulis kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

- 2) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Kedaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD
- 4) Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD
 - Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD
 - Pemeriksaan dan Monitoring Pajak/Retribusi Daerah
- 5) Program Peningkatan dan Penerimaan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah
 - Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2
 - Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya
 - Peningkatan Administrasi Penerimaan dan keberatan Pajak Daerah
- 6) Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah
 - Peningkatan Pendataan/Penilaian Objek Pajak PBB P2 dan Pengelolaan BPHTB
 - Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya
- c) Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja, program dan kegiatan disebabkan karena :
 - Seluruh program dan kegiatan mengacu pada DPA tahun berjalan dalam implementasinya mengacu pada indikator kinerja program dengan menggunakan indikator capaian program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2016-2021.
 - Tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur Badan Pendapatan

Kabupaten Mojokerto yang memiliki etos kerja tinggi dan dapat didayagunakan secara optimal dan iklim kerja yang kondusif dan koordinasi yang optimal antar bidang /staf.

- Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto yang dapat difungsikan secara optimal.
- d) Dengan terpenuhinya target Renstra PD yang didasarkan realisasi program dan kegiatan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai dengan mekanisme tahapan penyusunan rencana kerja PD
- e) Belum tercapainya Target pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikarenakan penyesuaian dari belanja yang harus dibayar.
- f) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, ialah terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang mandiri secara ekonomi keuangan daerah.
- g) Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut dengan melakukan perubahan anggaran (PAPBD) jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan, atau dengan pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program serta perlu dilakukan revisi terhadap indikator kinerja yang terdapat dalam renstra.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Badan Pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 (n-1) disesuaikan dengan Renstra PD baik dari Sasaran, Program dan Kegiatan serta anggaran yang masih bertumpuh pada Indikator Tahun sebelumnya. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel 2.1

(Tabel T-C.29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01 . 4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
4.01 . 4.04. 08	Badan Pendapatan Daerah	Presentase Capaian Penerimaan PAD	100%	113%				-	-	-
4.01 .4.04. 08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan AdmnistrasiPerk antoran	100%	100%				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01 .4.04. 08 .01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	81 unit	81 unit				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	58 alat tulis	58 alat tulis				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	21 percetakan	21 percetakan				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis Peralatan kantor	5 Jenis Peralatan kantor				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu makan tamu dan rapat yang disediakan	12 bulan	12 bulan				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01 .4.04. 08 .01 . 21	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .01 . 23	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah jasa tenaga kerja kontrak yang tersedia	17 Orang	17 Orang				-	-	-
4.01 .4.04. 08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100 %.	100 %.				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubel yang tersedia	2 janis	2 janis				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik	1 gedung	1 gedung				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah waktu pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional	12 bulan	12 bulan				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01 .4.04. 08 .02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah waktu peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	12 bulan				-	-	-
4.01 .4.04. 08 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pegawai Dengan Tingkat Kedisiplinan Kedinasan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100 %.	100 %.				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	60 Stel	60 Stel				-	-	-
4.01 .4.04. 08 .03 . 10	Peningkatan Kualitas SDM Karyawan Bimtek Pajak Daerah	Jumlah karyawan yang mengikuti bimtek	-	-				-	-	-
4.01 .4.04. 08 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Bapenda yang Disusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01 .4.04. 08 .06 . 05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	7 Dokumen	7 Dokumen				-	-	-
4.04. 08 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Capaian Pajak daerah	100%	102,27%				-	-	-
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pajak daerah	Jumlah Capaian pajak daerah	304200000000	310814774119					-	
4.04. 08 . 01 . 24	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD	Tingkat Ketersediaan data proyeksi PAD	100%	100%					-	-
4.04. 08 . 01 . 24 . 01	Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Potensi PAD	516.607.876.981	540.120.371.981					-	
4.04. 08 . 01 . 24 . 04	Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD	Jumlah Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi daerah yang ditingkatkan	7 aplikasi	7 aplikasi					-	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4) 1
4.04.08.01.24.05	Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah	Jumlah wajib Pajak daerah yang diperiksa/dimonitoring	50 Wajib pajak	50 Wajib pajak					-	
4.04.08.01.25	Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	80%	90%					-	
4.04.08.01.25.01	Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB P2	Jumlah Capaian Penerimaan PBB P2	82.000.000.000	88.952.410.217					-	
4.04.08.01.25.02	Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	222.200.000.000	223.104.443.681,34					-	
4.04.08.01.25.03	Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan Administrasi Penerimaan Pajak Daerah	527 laporan	527 laporan					-	
4.04.08.01.26	Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan potensi Pajak Daerah	4%	9%					-	
4.04.08.01.26.01	Peningkatan Pendataan/Penilaian PBB P2 dan Pengelolaan BPHTB	Jumlah Potensi PBB P2 dan BPHTB	160.250.000.000	164.797.486.013					-	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.08.01.26.03	Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat pelayanan langsung	6.650 Wajib Pajak	6200 WP					-	
4.04.08.01.26.04	Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Potensi pajak daerah lainnya	163.350.000.000	167.750.000.000					-	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Anggaran			90%	91,71%	101,90%	90%	34%	36 %
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95%	99,78	105%	95%	50%	50 %
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat tersusun			5 Dokumen	5 Dokumen	100%	3 Dokumen	1	33 %
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat tersusun			6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	4	67 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah			95%	97,31	102,43%	95%	100%	100%
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya yang dapat terpenuhi			60 Stel	60 Stel	100%	60 stel	-	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah karyawan yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						150 Karyawan	150	100%
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			95%	91,51	96,32%	95%	21%	21%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25 %
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu penyediaan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25 %
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25 %
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan / Material yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25 %
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25 %
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95%	79,67	83,86%	95%	-	-
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	-	-
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Waktu Penyediaan Meubeler yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	-	-
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95%	83,15	87,52%	95%	25%	25 %
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	-	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25 %
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95%	58,32	61,38%	95%	17%	-
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25 %
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara			1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	-	-
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Sar dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			100%	115,79%	115,79%	100%	20,51%	20,51%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi PAD, Persentase penerimaan pajak daerah dan Persentase peningkatan potensi pajak daerah			3%, 100% dan 4 %	3%,114,43%,4,08%	3%,114,43%,4,08%	3%, 100%,4%	1,84%; 4,28%; 21,83%	1,84%; 4,28%; 21,83%
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah target PAD tahun N+1			542.085.836.236	542.085.836.236	100%	586.888.777.888	568.958.684.125	100%
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Analisa/ Kebijakan dalam Pencapaian target PAD			2 Kebijakan	5 Kebijakan	250%	2 Kebijakan	1 Draf Kebijakan	50%
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi pajak dan retribusi daerah yang ditingkatkan			8 Aplikasi	8 Aplikasi	100%	8 Aplikasi	-	-
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah potensi obyek pajak daerah tahun n+1			21.844 Obyek Pajak	25.863 Obyek Pajak	118%	23.500 Obyek Pajak	6.438	29%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02. 04.2. 01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah potensi obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB tahun n+1			552.934 obyek pajak	43.282	8%	50.000 obyek pajak	4.290	39 %
5.02. 04.2. 01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah ketetapan pajak daerah			593.000 WP	609.389	103%	612.619 Ketetapan	615058	100 %
5.02. 04.2. 01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terlayani			6.800 Wajib pajak	6.472 Wajib Pajak	95%	13.000 Wajib Pajak	1.450	16 %
5.02. 04.2. 01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah evaluasi dan laporan pajak dan retribusi daerah			54 laporan	60 Laporan	111%	54 Laporan	13 Laporan	24 %
5.02. 04.2. 01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak daerah			332.547.486.014	350.152.898.033	114,43%	363.750.176.873	72.581.429.404	22 %
5.02. 04.2. 01.12	penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keberatan wajib pajak						130 WP	22 WP	15 %
5.02. 04.2. 01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diperiksa			100 Wajib pajak	132 Wajib Pajak	132%	135 Wajib pajak	31 WP	31 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02. 04.2. 01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Target pajak dan retribusi daerah tahun n			540.120.371.981	625425485600,97	115,79%	573.736.488.038	561.717.556.090,575	101%
									-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki terjadinya perubahan paradigma birokrasi pemerintahan dengan meningkatkan Kinerja Birokrasi dalam melayani publik secara total melalui aspek responsibilitas. Para pengemban tugas pemerintahan dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pihak yang dilayani masyarakat.

Tugas pemerintah dalam melayani kepentingan publik dihadapkan pada beragam kebutuhan dan jenis pelayanan serta tanggungjawab mensejahterakan masyarakat dengan memberikan manfaat bagi seluruh warga. Kurangnya optimalisasi dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadikan sarana intropeksi ke perbaikan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat menuju pelayanan prima.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto hingga Tahun 2021 telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanan pembayaran pajak diantaranya dengan :

1. Dimasa pandemi covid-19 telah diberlakukannya system Pelayanan Berbasis Online melalu social media WhatssApp, sehingga wajib pajak dapat terlayani tanpa harus kuatir akan resiko terpaparnya virus.
2. Terjalinnya Kerjasama dengan beberapa e-commers, merchant dan beberapa perbankan telah menjadikan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara non tunai melalui 15 layanan pembayaran Pajak Daerah hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
3. terselesaikannya aplikasi SiPanjol ditahun 2020 diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dan kesadaran akan pembayaran pajak karena Wajib Pajak dapat Menghitung, Melaporkan dan Membayar Pajak Daerah secara elektronik (*Papperless*) melalui sipanjol.mojokertokab.go.id Lebih mudah, efektif dan efisien
4. Inovasi Integrasi Antar Sistem Bapenda (*Host to Host*) dengan DPMPTSP terkait PBB-P2 yang bertujuan untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) terkait PBB-P2 pada saat pemohon mengajukan

layanan ke DPMPTS

5. Inovasi E-SPPT PBB-P2 yaitu Penyampaian SPPT PBB-P2 secara elektronik (*paperless*) melalui pesan singkat (SMS) berupa link langsung kepada Wajib Pajak
6. Inovasi Polling Desa PBB-P2 yang diperuntukan sebagai Administrasi dan Pembayaran PBB-P2 secara elektronik untuk Petugas Pemungut PBB tingkat Desa/Dusun.
7. TerIntegrasinya Antar Sistem Bapenda (*Host to Host*) dengan Dispendukcapil untuk Mempermudah Wajib Pajak Daerah dalam melakukan pelaporan perpajakan daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIP) dan menjadikan Database Wajib Pajak Daerah lebih akurat.
8. Inovasi Dashboard Pemantauan Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk Memantau Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar
9. Inovasi Dashboard Pemantauan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah untuk Memantau Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar
10. Inovasi Dashboard Pemantauan Piutang Pajak Daerah untuk Memantau Piutang Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto :

Tabel 2.2
(Tabel T.C.30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisis
			Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	Persentase capaian penerimaan PAD	$\frac{\text{Jumlah Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	113.02 %	115,78%	100%	100%	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

1. Kinerja Pelayanan Masa Kini

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa "*pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah*" sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Kabupaten Mojokerto. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis.

Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Sebagai proses terealisasinya penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di

daerah.

Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut : Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya Dinas Teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati cq. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.
- b. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.
- c. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

- d. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu
- e. Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto melakukan beberapa inovasi dan berbagai kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:

- a. Dimasa pandemi covid-19 telah diberlakukannya system Pelayanan Berbasis Online melalui social media WhatsApp, sehingga wajib pajak dapat terlayani tanpa harus khawatir akan resiko terpaparnya virus.
- b. Terjalannya Kerjasama dengan beberapa e-commerce, merchant dan beberapa perbankan telah menjadikan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara non tunai melalui 15 layanan pembayaran Pajak Daerah hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- c. terselesaikannya aplikasi SiPanjol ditahun 2020 diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dan kesadaran akan pembayaran pajak karena Wajib Pajak dapat Menghitung, Melaporkan dan Membayar Pajak Daerah secara elektronik (*Papperless*) melalui sipanjol.mojokertokab.go.id Lebih mudah, efektif dan efisien
- d. Inovasi Integrasi Antar Sistem Bapenda (*Host to Host*) dengan DPMPTSP terkait PBB-P2 yang bertujuan untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) terkait PBB-P2 pada saat pemohon mengajukan layanan ke DPMPTS
- e. Inovasi E-SPPT PBB-P2 yaitu Penyampaian SPPT PBB-P2 secara elektronik (*paperless*) melalui pesan singkat (SMS) berupa link langsung kepada Wajib Pajak
- f. Inovasi Polling Desa PBB-P2 yang diperuntukan sebagai Administrasi dan Pembayaran PBB-P2 secara elektronik untuk Petugas Pemungut PBB tingkat Desa/Dusun.
- g. TerIntegrasinya Antar Sistem Bapenda (*Host to Host*) dengan Dispendukcapil untuk Mempermudah Wajib Pajak Daerah dalam melakukan pelaporan perpajakan daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIP) dan menjadikan Database Wajib Pajak Daerah lebih akurat.

- h. Inovasi Dashboard Pemantauan Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk Memantau Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar
- i. Inovasi Dashboard Pemantauan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah untuk Memantau Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar
- j. Inovasi Dashboard Pemantauan Piutang Pajak Daerah untuk Memantau Piutang Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar
- k. Inovasi Sistem aplikasi pembayaran pajak dengan Bank Umum (BNI, Bank Mandiri, Bank BRI serta Bank Jatim);
- l. Inovasi system aplikasi pelaporan pajak hotel dan restoran online (e-STPD);
- m. Inovasi e-Validasi BPHTB;
- n. Inovasi Host To Host (H2H) antar system data perolehan hak atas tanah Bapenda dan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- o. Inovasi pelaksanaan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam penyelesaian tunggakan;
- p. Inovasi e-Billing / Tapping Box untuk penerapan pelaporan keuangan secara online bagi wajib pajak hotel dan restoran
- q. Inovasi System Aplikasi Pendataan elektronik (e-Pendataan) untuk petugas pajak;
- r. Melakukan validasi piutang ke desa-desa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah;
- s. Optimalisasi peranan PPNS Perpajakan dalam pelaksanaan penagihan pajak melalui Pendekatan Persuasif;
- t. Melaksanakan pemutakhiran data potensi terhadap subjek dan objek pajak daerah;
- u. Melakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak;
- v. Penyempurnaan ketentuan teknis penagihan pajak dengan melakukan konsultasi kepada instansi pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan

dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah yang merupakan permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

Permasalahan dan Hambatan secara Internal terdiri atas :

- 1) Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;

Permasalahan dan Hambatan secara Eksternal terdiri atas :

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

- 2) Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah
- 3) Rasio antara aparaturnya pelaksana pembinaan dan pengendalian (PPNS) dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai.

3. Tantangan dan Peluang

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah dihadapkan pada peluang dan juga tantangan yang harus diambil.

Peluang dan Tantangan tersebut harus bisa menjadi tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah, dimana peluang dan tantangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Tantangan yang harus dihadapi terdiri atas :

- a) Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Mojokerto, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
- b) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu;

2) Peluang yang dihadapi terdiri atas :

- a) Dengan diberlakukannya UU No.1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana pada pasal 41 disebutkan bahwa salah satu tarif pajak yang akan diubah atau dinaikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah
- b) Diberlakukannya UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada bab IV Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi akan diberlakukannya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1% yang semula 10 % menjadi 11% dapat meningkatkan Potensi pada pajak daerah lainnya.
- c) Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

- d) Dukungan dari lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- e) Kondisi sosial di Kabupaten Mojokerto cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Mojokerto akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
- f) Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.
- g) Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.
- h) Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- i) Penerapan Nilai Pasar Tanah sebagai indikator pengenaan BPHTB akan menguntungkan banyak pihak baik masyarakat, Investor maupun Badan Pendapatan Daerah karena terjadi

peningkatan harga jual yang berbanding lurus dengan Peningkatan Pajak BPHTB.

- j) Pendataan semua calon wajib Pajak dan Wajib pajak hingga data tersebut mutakhir dan valid secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
- k) Pembuatan Aplikasi dalam mendukung proses pengelolaan pajak yang modern, sesuai dengan proses bisnis yang telah dibuat.
- l) Membuat aplikasi untuk para wajib pajak mulai dari proses Pendaftaran, Pelaporan STTPD dengan melakukan pembayaran pajak serta menerima bukti pembayaran pajak.
- m) Kerjasama dengan bank kas daerah, dengan E-commerce dan juga Merchant serta dilakukan host to host agar proses pembayaran pajak langsung ke bank kas daerah.
- n) Pelaksanaan Updating Peta yang digunakan untuk memperkecil kesalahan pengukuran potensi sehingga badan pendapatan daerah mampu mengukur potensi yang ada secara valid.

22.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3

(Tabel T.C.31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapenda	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84.00%	25.733.810.569	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.000.000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.500.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	7.500.000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	23.215.896.825	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	23.215.896.825	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100%	392.863.750	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Bapenda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	46.760.000	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan		80.115.000	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		265.988.750	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	900.749.228	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	0	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket	9.000.000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	700 Paket	71.928.000	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	182.954.966	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	129.030.000	
						Penyediaan Bahan/Material	Bapenda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	263.395.706	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	63.390.556	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	181.050.000	
						Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	521.248.176	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	221.940.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	299.308.176	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	688.052.590	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	86 Unit	459.180.000	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		178.872.590	0
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bapenda	Jumlah aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		50.000.000	0
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda		100%	7.270.503.794	
						Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bapenda	Persentase Peningkatan Potensi PAD, Persentase Penerimaan Pajak Daerah dan Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah	3, 100, 4%	7.270.503.794	
						Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	29.900.000	
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerahserta Pengembangan Pajak Daerah danKebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	401.587.200	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Unit	793.530.200	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	23.100 Laporan	1.034.436.700	
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50.000 Objek Pajak	369.613.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	630.500 Dokumen	357.062.000	
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.000 Layanan	115.676.400	
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	252 Dokumen	68.152.300	
						Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	3.589.492.294	
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	140 Dokumen	80.000.000	
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	130 Dokumen	154.853.900	
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	89.878.000	
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	186.321.000	
										33.004.314.363	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4

(Tabel T-C.32. dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

KAB.MOJOKERTO

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar Negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan. Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk diperbaiki membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan Negara dan sekaligus meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan investasi melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian intensif berupa stimulus perpajakan.

Pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) adalah suatu bentuk dukungan DPR terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. pengesahan kedua UU tersebut juga akan mempercepat reformasi struktural nasional setelah pandemi Covid-19. UU HPP akan memperkuat sistem

perpajakan di Indonesia. UU tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan, dengan ruang lingkup meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Sementara pada UU HKPD, diharapkan akan memperkuat desentralisasi fiskal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan ketimpangan antardaerah. Peraturan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja, memperkuat pajak daerah, dan mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah serta membawa dampak positif pada pendapatan asli daerah (PAD).

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan misinya **dalam ” *Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan* ”**, maka ditetapkan **tujuan** untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri Melalui **Optimalisasi Peningkatan PAD**.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran triwulan atau bulanan. Adapun sasaran dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ialah **“Optimalnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”**.

Dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai, ditetapkan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

DATA PENGHITUNGAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH APBD 2023 KABUPATEN MOJOKERTO

NO	URAIAN	TARGET APBD 2023
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	395.677.500.000,00
a	Pajak Hotel	4.000.000.000,00

NO	URAIAN	TARGET APBD 2023
b	Pajak Restoran	10.000.000.000,00
c	Pajak Hiburan	1.015.000.000,00
d	Pajak Reklame	4.000.000.000,00
e	Pajak Penerangan Jalan	112.000.000.000,00
f	Pajak Parkir	162.500.000,00
g	PBB-P2	100.000.000.000,00
h	BPHTB	73.000.000.000,00
i	Pajak Minerba (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	55.000.000.000,00
j	Pajak Air Tanah	36.500.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	39.008.003.881,91
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan di tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis (Labkesda)	61.227.000,00
b	Pendapatan BLUD	
c	Kapitasi Puskesmas	36.409.568.634,26
d	Non Kapitasi Puskesmas	1.492.005.087,60
e	Pendapatan Umum	897.785.559,14
f	Jasa Giro	94.417.600,91
g	Kerjasama BLUD	53.000.000,00
3	RSUD RA BASOENI	60.000.000.000,00
a	IGD	3.000.000.000,00
b	Rawat Jalan	10.100.000.000,00
c	Rawat Inap	19.500.000.000,00
d	Perawatan E (Covid)	16.000.000.000,00
e	Patologi Anatomi	650.000.000,00
f	Unit Kamar Operasi	2.500.000.000,00
g	Unit Farmasi	2.000.000.000,00
h	ICU	2.000.000.000,00
i	Gizi	600.000.000,00
j	Labolatorium	2.000.000.000,00
k	Radiologi	1.000.000.000,00
l	Pemulasaran/Kamar Jenazah	275.000.000,00
m	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	20.000.000,00
n	Pendapatan Lain - lain BLUD	255.000.000,00
o	Penerimaan Lain-lain	100.000.000,00
4	RSUD PROF DR SOEKANDAR	85.000.000.000,00
a	Instalasi Gawat Darurat	3.323.600.000,00
b	Instalasi Rawat Jalan	4.754.200.000,00
c	Instalasi Rawat Inap	25.294.000.000,00
d	Instalasi Bedah Sentral	5.847.600.000,00

NO	URAIAN	TARGET APBD 2023
e	Instalasi Perawatan Intensif	2.880.000.000,00
f	Instalasi Radiologi	1.620.000.000,00
g	Instalasi Laboratorium	7.148.000.000,00
h	Instalasi Hemodialisa	12.000.000.000,00
i	Instalasi Kemoterapi	48.000.000,00
j	Instalasi Farmasi	20.471.092.000,00
k	Instalasi Pemulasaraan Jenazah	660.000.000,00
l	Bagian Umum	366.000.000,00
m	Bagian Keuangan	424.308.000,00
n	Bagian Pengembangan dan Evaluasi	
o	Bidang Pelayanan	13.200.000,00
p	Bidang Keperawatan	150.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	7.000.000.000,00
a	Parkir Berlangganan	4.267.740.000,00
b	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.272.210.500,00
c	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	13.484.500,00
d	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	445.965.000,00
e	Retribusi Ijin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	600.000,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.326.450.000,00
a	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	107.267.500,00
b	Retribusi Pengujian Laboratorium Bahan Jalan	22.222.500,00
c	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.196.960.000,00
7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA	6.066.892.600,00
a	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) :	6.066.892.600,00
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.415.000.000,00
a	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.265.000.000,00
b	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu (RUMIJA)	150.000.000,00
9	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	14.276.028.025,00
a	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	14.201.028.025,00
b	Wana Wisata Padusan Pacet	5.565.000.000,00
c	Kolam /Pemandian Air Panas	4.070.000.000,00
d	Dlundung	500.000.000,00

NO	URAIAN	TARGET APBD 2023
e	Jolotundo	800.000.000,00
f	Makam Religius Troloyo	630.000.000,00
g	Musium Trowulan	247.735.000,00
h	Ubalan	2.001.000.000,00
i	Coban Cangu	275.000.000,00
j	Candi Bajang Ratu	37.430.000,00
k	Candi Brahu	37.433.000,00
l	Candi Tikus	37.430.025,00
m	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00
n	Sewa Stadion GAJAHMADA Mojosari	60.000.000,00
o	Sewa Gor Indoor GAJAHMADA Mojosari	15.000.000,00
10	DINAS PENDIDIKAN	21.360.000,00
a	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.360.000,00
b	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	18.000.000,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.000.000.000,00
a	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	319.088.000,00
b	Retribusi Pelayanan Pasar	2.799.485.000,00
c	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	742.427.000,00
d	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan	60.000.000,00
e	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	79.000.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.395.513.300,00
a	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.002.000.000,00
b	Retribusi Pemakaian Laboratorium (Retribusi Laboratorium Lingkungan Hidup)	1.393.513.300,00
13	DINAS PERTANIAN	622.875.000,00
a	Retribusi Rumah Potong Hewan	112.075.000,00
b	Retribusi Pengujian Laboratorium (Retribusi Laboratorium Hewan)	480.000.000,00
c	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERALATAN (PASAR HEWAN)	30.800.000,00
14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.200.000.000,00
a	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.200.000.000,00
15	DINAS TENAGA KERJA	1.875.000.000,00
a	Ret. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	1.875.000.000,00
16	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	100.000.000,00
a	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	
b	b. Benih Ikan Nila 3 - 5 cm	42.000.000,00

NO	URAIAN	TARGET APBD 2023
c	c. Benih Ikan Nila 1 - 3 cm	10.000.000,00
d	d. Benih Ikan Lele 5 - 7 cm	48.000.000,00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	858.150.000,00
a	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	858.150.000,00
JUMLAH		632.842.772.806,91

3.3. Program Dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Capaian urusan Pemerintah daerah.

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah.

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan

4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang

Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

7. Penyediaan Bahan/Material

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

8. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

2. Pengadaan Mebel

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

3. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan

4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Unit Aset Tetap lainnya yang disediakan

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah waktu

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

6. Pemeliharaan Mebel

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kegiatan :

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah peningkatan potensi PAD, Jumlah peningkatan potensi pajak daerah dan Jumlah penerimaan pajak daerah.

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya

6. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
9. Penagihan Pajak Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
13. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV
RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.MOJOKERTO
 TAHUN ANGGARAN 2023

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaa Perangkat Daerah Tahun2023 dan Prakiraan Maju 2024

Kabupaten Mojokerto

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/
										Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	2				KEUANGAN								33,063,143,263				37,308,457,672	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								25,815,935,569				29,056,965,619	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15,000,000				14,883,700	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	3 Dokumen	70 Nilai	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	9,159,200

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	6 Laporan	70 Nilai	7,500,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	5,724,500
5	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								23,215,896,825				24,339,343,690	
5	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	51 Orang /bulan	70 Nilai	23,215,896,825	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	24,339,343,690
5	2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								392,863,750				328,025,021	
5	2	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	4 Orang	70 Nilai	46,760,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	57,000,000
5	2	1	2.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	165 Orang	70 Nilai	80,115,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	0
5	2	1	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	165 Orang	70 Nilai	265,988,750	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	217,531,000
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								982,874,228				1,798,150,580	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	2 Paket	70 Nilai	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	0
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	1000 Paket	70 Nilai	71,928,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	78,090,767
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	4 Paket	70 Nilai	182,954,966	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	226,690,200
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	12 Dokumen	70 Nilai	211,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	158,653,780
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	3 Paket	70 Nilai	263,395,706	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	227,835,100
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	12 Laporan	70 Nilai	63,390,556	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	76,470,733

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	12 Laporan	70 Nilai	181,050,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	343,470,000
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								521,248,176				646,071,890	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	12 Laporan	70 Nilai	221,940,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	341,070,540
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	12 Laporan	70 Nilai	299,308,176	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	261,495,150
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								688,052,590				1,243,550,738	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	87 Unit	70 Nilai	459,180,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	860,009,238
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	194 Unit	70 Nilai	178,872,590	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Nilai RB Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40 (A) nilai	6 Unit	70 Nilai	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A) nilai	0
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								7,247,207,694					8,251,492,053
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								7,247,207,694					8,251,492,053
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 Dokumen	100.34 Persen	29,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	58,711,817
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 Dokumen	100.34 Persen	401,587,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	269,128,781
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	8 Unit	100.34 Persen	793,530,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	617,209,866

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2	4	2.0 1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	23100 Laporan	100.34 Persen	1,034,436,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	1,412,707,280
5	2	4	2.0 1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	50000 Objek Pajak	100.34 Persen	369,613,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	279,317,818
5	2	4	2.0 1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	630500 Dokumen	100.34 Persen	357,062,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	313,215,445
5	2	4	2.0 1	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	11000 Layanan	100.34 Persen	115,676,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	149,158,717

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	252 Dokumen	100.34 Persen	68,152,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	102,354,060
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	12 Dokumen	100.34 Persen	3,589,492,294	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	4,155,987,000
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	140 Dokumen	100.34 Persen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	137,388,000
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	130 Dokumen	100.34 Persen	154,853,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	456,074,464

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2	4	2.0 1	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 Laporan	100.34 Persen	89,878,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	300,238,805
5	2	4	2.0 1	1 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah, persentase Peningkatan Potensi PAD. Persentase Potensi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	12 Laporan	100.34 Persen	163,024,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00 %	0
TOTAL													33,063,143,263					37,308,457,672

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah 5 (lima) Tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Mojokerto serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja PD untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran tanggungjawab / tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, RENJA Badan Pendapatan Daerah ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Mojokerto, 11 Juli 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



MARDIASIH, SH., M.H

Pembina Utama Muda
NIP. 196404051997032